

BAB V

SIMPULAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Layanan Perpustakaan Umum Daerah pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi telah dilaksanakan, namun belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Kebijakan tersebut secara normatif telah memberikan pedoman yang jelas mengenai sistem layanan, jenis layanan, pengelolaan koleksi, serta penguatan peran perpustakaan sebagai pusat literasi masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi capaian tujuan secara menyeluruh.

Dari aspek komunikasi, proses penyampaian informasi mengenai kebijakan dan program layanan perpustakaan belum dilakukan secara komprehensif dan merata. Sosialisasi yang dilakukan masih terbatas pada media tertentu dan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan sebagian masyarakat belum memahami secara jelas manfaat, jenis layanan, maupun program unggulan yang tersedia. Di sisi internal organisasi, arus komunikasi antarbidang juga belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis. Kurangnya konsistensi dan kejelasan informasi berdampak pada pelaksanaan program yang belum sepenuhnya selaras dengan tujuan kebijakan. Dengan demikian, komunikasi menjadi salah satu faktor krusial yang perlu diperkuat agar pesan kebijakan dapat dipahami secara utuh oleh pelaksana maupun masyarakat sebagai penerima layanan.

Pada aspek sumber daya, implementasi kebijakan masih dihadapkan pada keterbatasan baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana. Ketersediaan koleksi buku dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam, baik dari sisi kuantitas maupun pembaruan konten. Selain itu, fasilitas pendukung seperti ruang baca, meja, colokan listrik,

serta kondisi kebersihan dan kenyamanan ruang layanan masih menjadi perhatian. Keterbatasan anggaran turut memengaruhi kemampuan organisasi dalam melakukan inovasi layanan dan pengembangan fasilitas secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah memiliki arah dan tujuan yang jelas, efektivitas pelaksanaannya tetap sangat bergantung pada kecukupan dan pengelolaan sumber daya yang tersedia.

Dari sisi disposisi atau sikap pelaksana, penelitian menunjukkan bahwa komitmen aparatur dalam menjalankan kebijakan sudah ada, namun belum sepenuhnya diiringi dengan inisiatif dan inovasi yang kuat. Pelaksanaan tugas masih cenderung bersifat administratif dan rutin, belum sepenuhnya berorientasi pada pengembangan layanan yang kreatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemahaman terhadap tujuan besar kebijakan, yaitu meningkatkan literasi dan kualitas sumber daya manusia, belum terinternalisasi secara menyeluruh dalam setiap tindakan pelayanan. Sikap yang kurang proaktif ini berdampak pada kualitas interaksi dengan pengunjung serta minimnya pengembangan program berbasis kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas, motivasi, serta orientasi pelayanan publik menjadi elemen penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Selanjutnya, dalam aspek struktur birokrasi, secara formal organisasi telah memiliki pembagian tugas dan struktur yang jelas. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antarbidang masih memerlukan penguatan agar tercipta sinergi yang lebih efektif. Perencanaan dan pelaksanaan program belum sepenuhnya terintegrasi berdasarkan kebutuhan riil pengguna layanan. Standar Operasional Prosedur telah tersedia, tetapi implementasinya belum selalu konsisten dan adaptif terhadap dinamika pelayanan. Fragmentasi tugas dan kurangnya sinkronisasi berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program. Dengan demikian, penguatan mekanisme koordinasi dan evaluasi internal menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan kebijakan berjalan secara terpadu.

Selain berbagai kendala tersebut, terdapat pula upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh pihak dinas. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi layanan, penyediaan sistem pencarian koleksi berbasis komputer, serta pelaksanaan

program literasi dan kegiatan berbasis inklusi sosial menunjukkan adanya komitmen institusional untuk meningkatkan kualitas layanan. Upaya ini menjadi indikasi bahwa organisasi tidak bersifat pasif, melainkan terus beradaptasi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Namun demikian, upaya tersebut masih memerlukan penguatan secara sistematis agar dampaknya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Secara keseluruhan implementasi kebijakan layanan perpustakaan umum daerah di Kota Bekasi berada pada kategori cukup berjalan, tetapi belum sepenuhnya efektif dan efisien. Keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, melainkan sangat bergantung pada kualitas komunikasi, kecukupan sumber daya, komitmen pelaksana, serta efektivitas struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan sistem implementasi. Apabila salah satu aspek mengalami kelemahan, maka aspek lainnya turut terdampak.

Dengan demikian diperlukan penguatan secara simultan pada seluruh variabel implementasi agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Peningkatan intensitas sosialisasi, pengembangan koleksi dan fasilitas secara berkelanjutan, pembinaan profesionalisme aparatur, serta perbaikan koordinasi internal menjadi langkah strategis yang harus dilakukan. Apabila perbaikan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, maka layanan perpustakaan umum daerah di Kota Bekasi berpotensi menjadi lebih responsif, inklusif, dan berdaya guna dalam mendukung peningkatan literasi serta pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan penelitian yang menunjukkan masih adanya kelemahan dalam beberapa variabel implementasi kebijakan, maka diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat sistematis dan berkelanjutan untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Saran yang diajukan difokuskan pada variabel yang memiliki hambatan paling signifikan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi dalam pelaksanaan Peraturan

Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2021 di lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi.

Pertama, pada variabel komunikasi, diperlukan penguatan strategi sosialisasi kebijakan dan layanan perpustakaan secara lebih terstruktur dan masif. Sosialisasi tidak hanya mengandalkan media sosial, tetapi juga perlu diperluas melalui kerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, kelurahan, komunitas literasi, dan organisasi masyarakat. Pendekatan komunikasi publik harus dirancang menggunakan prinsip komunikasi kebijakan yang efektif, yakni jelas, konsisten, dan berulang. Dinas perlu menyusun rencana komunikasi (*communication plan*) tahunan yang memuat target sasaran, media yang digunakan, frekuensi publikasi, serta indikator keberhasilan sosialisasi. Selain itu, komunikasi internal antarbidang harus diperkuat melalui rapat koordinasi rutin, penyusunan laporan berkala, dan penggunaan sistem informasi internal yang terintegrasi. Dengan demikian, tidak terjadi lagi distorsi informasi atau ketidaksinkronan pelaksanaan program antarunit kerja.

Kedua, pada variabel sumber daya, diperlukan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Dari sisi sumber daya manusia, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi pustakawan secara berkala, khususnya dalam bidang pelayanan prima, literasi digital, manajemen koleksi, dan inovasi layanan berbasis teknologi. Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui workshop, bimbingan teknis, maupun kerja sama dengan lembaga pendidikan dan asosiasi perpustakaan. Dari sisi anggaran, dinas perlu mengoptimalkan perencanaan berbasis kebutuhan (*needs based budgeting*) agar alokasi dana lebih tepat sasaran, terutama untuk pembaruan koleksi dan peningkatan fasilitas layanan. Jika memungkinkan, perlu juga menjajaki sumber pendanaan alternatif melalui kerja sama dengan pihak swasta atau program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Dalam hal sarana dan prasarana, pembaruan koleksi buku harus dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan aktual masyarakat, termasuk literatur populer, buku pengembangan diri, literasi digital, serta referensi akademik. Selain itu, fasilitas ruang baca perlu ditingkatkan agar lebih nyaman dan ramah

pengunjung, misalnya dengan penambahan meja baca, perbaikan sistem pencahayaan dan ventilasi, serta penyediaan akses listrik dan internet yang memadai. Kenyamanan ruang pelayanan menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat kunjung dan kepuasan pengguna.

Ketiga, pada variabel disposisi atau sikap pelaksana, diperlukan penguatan komitmen dan orientasi pelayanan publik. Dinas perlu menanamkan budaya kerja yang berorientasi pada inovasi, responsivitas, dan pelayanan prima. Hal ini dapat dilakukan melalui pembinaan internal, pemberian motivasi, serta sistem evaluasi kinerja yang berbasis pada kualitas layanan, bukan hanya pada pemenuhan tugas administratif. Aparatur perlu didorong untuk memahami bahwa perpustakaan bukan sekadar tempat penyimpanan buku, melainkan pusat pembelajaran masyarakat dan ruang inklusi sosial.

Untuk memperkuat disposisi positif pelaksana, pimpinan organisasi perlu memberikan keteladanan dalam hal integritas, profesionalisme, dan keterbukaan terhadap ide-ide baru. Selain itu, sistem penghargaan (*reward system*) bagi pegawai yang berinovasi dan menunjukkan kinerja pelayanan yang baik dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan motivasi kerja. Evaluasi kinerja sebaiknya tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mempertimbangkan umpan balik dari pengunjung sebagai indikator kualitas pelayanan.

Keempat, pada variabel struktur birokrasi, diperlukan penguatan koordinasi dan integrasi antarbidang agar pelaksanaan kebijakan berjalan secara sinergis. Pembagian tugas dan wewenang perlu dipastikan berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. SOP tersebut harus dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dengan kebutuhan pelayanan yang dinamis. Selain itu, mekanisme koordinasi lintas bidang perlu ditingkatkan melalui forum diskusi rutin yang membahas perencanaan program, evaluasi kegiatan, serta identifikasi permasalahan yang muncul di lapangan.

Struktur birokrasi juga perlu diarahkan agar lebih adaptif dan tidak kaku. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelayanan publik sebaiknya dilakukan secara cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pendelegasian wewenang yang proporsional kepada pejabat teknis dapat

mempercepat proses implementasi program tanpa harus melalui prosedur yang terlalu panjang. Koordinasi yang efektif akan mencegah tumpang tindih program serta memastikan bahwa setiap bidang bekerja dalam satu arah kebijakan yang sama.

Secara keseluruhan perbaikan pada keempat variabel tersebut harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Tidak cukup hanya memperbaiki satu aspek tanpa memperhatikan aspek lainnya, karena implementasi kebijakan merupakan suatu sistem yang saling berkaitan. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana perbaikan yang telah dilaksanakan memberikan dampak nyata terhadap kualitas layanan perpustakaan.

Apabila saran-saran ini dapat diimplementasikan secara konsisten, maka pelaksanaan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2021 akan menjadi lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, perpustakaan umum daerah di Kota Bekasi diharapkan mampu bertransformasi menjadi pusat literasi yang modern, inklusif, serta berdaya saing dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.